

ABSTRAK

Analisis kinerja keuangan pemerintah merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah karena dengan analisis kinerja ini pemerintah dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Maulina & Rhea, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ini adalah dokumentasi Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian metode ini digunakan untuk mengumpulkan data keuangan daerah selama 5 tahun kurung waktu 2019-2023. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten Timor Tengah selatan masih sangat rendah, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masih mengalami ketergantungan terhadap pemerintah pusat Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak

ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Berawal pada tahun 2019 Rasio Kemandirian sebesar 5,87% kemudian turun menjadi 5,05% di tahun 2020. Tahun 2021 Rasio Kemandirian sebesar 5,43% dan turun menjadi 2,93% di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 naik lagi menjadi 4,58% Walaupun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0%-25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri